

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**



MATA KULIAH	:	Teori Dan Praktek Politik Lokal
KODE MK	:	3PBIP223
SEMESTER	:	6

Tim Penyusun:

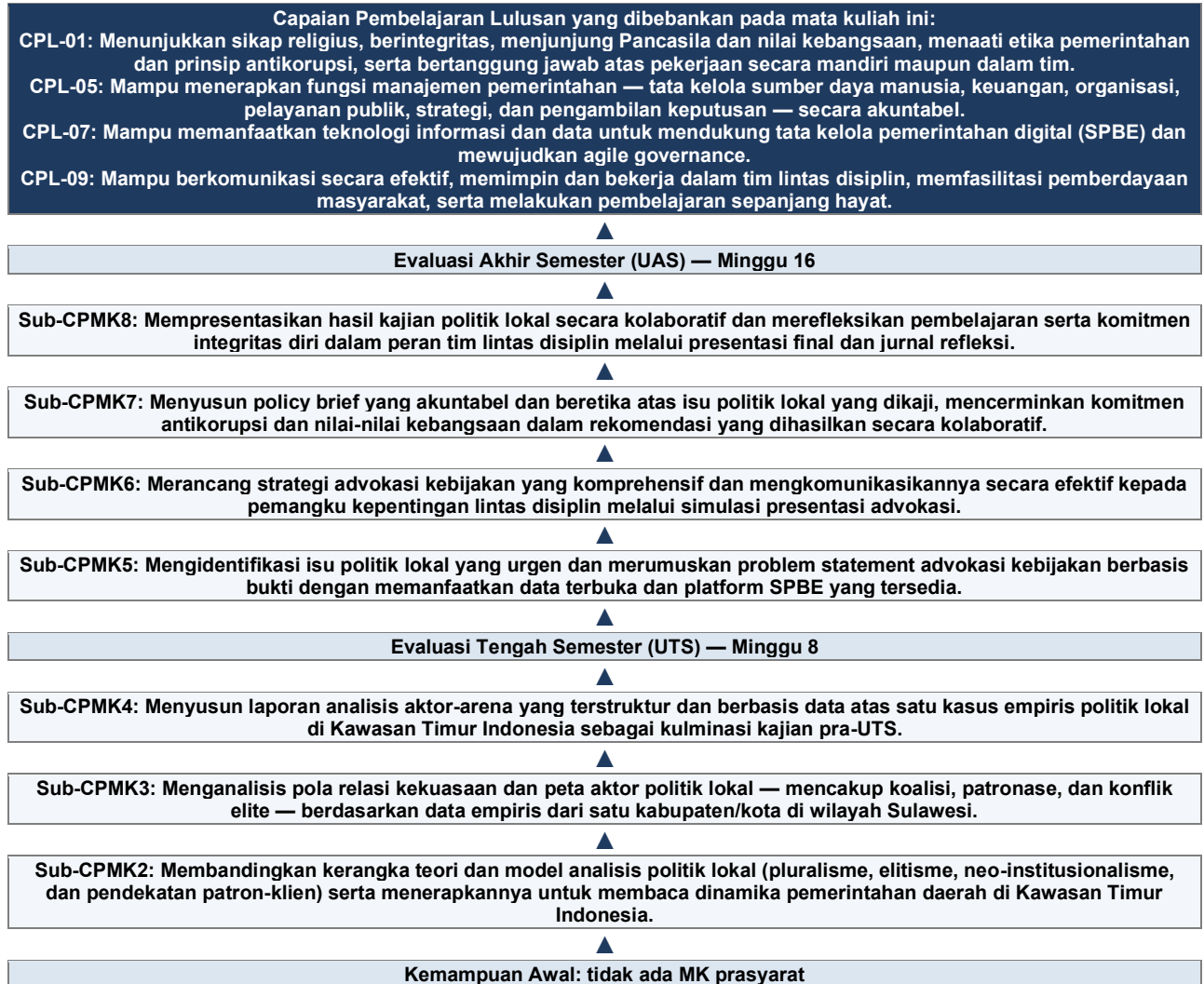
Purwanto, S.IP., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3PBIP223	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teori Dan Praktek Politik Lokal		3PBIP223	MKPP	T=3	P=0	6	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601	 Balada Raf, S.Sos., M.Si. NIDN. 0927076704		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.					
	CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.					
	CPL-07	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital (SPBE) dan mewujudkan agile governance.					
	CPL-09	Mampu berkomunikasi secara efektif, memimpin dan bekerja dalam tim lintas disiplin, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembelajaran sepanjang hayat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan kerangka analisis politik lokal (desentralisasi, otonomi daerah, aktor politik, arena kekuasaan) beserta dinamikanya dalam konteks pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia, dengan menjunjung nilai integritas dan kebangsaan sebagai landasan sikap kritis.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis pola relasi kekuasaan, peta aktor, dan dinamika politik lokal — termasuk praktik patronase, koalisi, dan konflik elite — melalui studi kasus empiris pemerintahan daerah di wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, menghasilkan laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data.					

	CPMK-3	Mahasiswa mampu merancang strategi advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat berbasis bukti sebagai respons atas isu politik lokal yang teridentifikasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan platform data tata kelola (SPBE/data terbuka) untuk memperkuat argumentasi, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin.			
	CPMK-4	Mahasiswa mampu menyajikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dalam bentuk presentasi dan laporan kebijakan (policy brief) yang akuntabel dan beretika, menampilkan sikap bertanggung jawab atas peran dalam tim lintas disiplin, serta merefleksikan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan.			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar politik lokal, kerangka desentralisasi, dan otonomi daerah serta mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah di Indonesia.			
	Sub-CPMK2	Membandingkan kerangka teori dan model analisis politik lokal (pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan pendekatan patron-klien) serta menerapkannya untuk membaca dinamika pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK3	Menganalisis pola relasi kekuasaan dan peta aktor politik lokal — mencakup koalisi, patronase, dan konflik elite — berdasarkan data empiris dari satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi.			
	Sub-CPMK4	Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data atas satu kasus empiris politik lokal di Kawasan Timur Indonesia sebagai kulminasi kajian pra-UTS.			
	Sub-CPMK5	Mengidentifikasi isu politik lokal yang urgen dan merumuskan problem statement advokasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data terbuka dan platform SPBE yang tersedia.			
	Sub-CPMK6	Merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin melalui simulasi presentasi advokasi.			
	Sub-CPMK7	Menyusun policy brief yang akuntabel dan beretika atas isu politik lokal yang dikaji, mencerminkan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan secara kolaboratif.			
	Sub-CPMK8	Mempresentasikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dan merefleksikan pembelajaran serta komitmen integritas diri dalam peran tim lintas disiplin melalui presentasi final dan jurnal refleksi.			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
	Sub-CPMK1	√	—	—	—
	Sub-CPMK2	√	—	—	—
	Sub-CPMK3	—	√	—	—
	Sub-CPMK4	—	√	—	—
	Sub-CPMK5	—	—	√	—
	Sub-CPMK6	—	—	√	—
	Sub-CPMK7	—	—	—	√
	Sub-CPMK8	—	—	—	√

	<table><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Jumlah	2	2	2	2																																																																	
Jumlah	2	2	2	2																																																																			
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																																																						
	<table><tr><td></td><td>CPL-01 (%)</td><td>CPL-05 (%)</td><td>CPL-07 (%)</td><td>CPL-09 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td>4</td><td></td><td></td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>41</td><td>21</td><td>14</td><td>24</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>		CPL-01 (%)	CPL-05 (%)	CPL-07 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	15				15	2	Sub-CPMK2	15				15	2	Sub-CPMK3		14			14	2	Sub-CPMK4		7			7	1	Sub-CPMK5			7	7	14	2	Sub-CPMK6			7	7	14	2	Sub-CPMK7	7			7	14	2	Sub-CPMK8	4			3	7	1		41	21	14	24	100	14
	CPL-01 (%)	CPL-05 (%)	CPL-07 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																																	
Sub-CPMK1	15				15	2																																																																	
Sub-CPMK2	15				15	2																																																																	
Sub-CPMK3		14			14	2																																																																	
Sub-CPMK4		7			7	1																																																																	
Sub-CPMK5			7	7	14	2																																																																	
Sub-CPMK6			7	7	14	2																																																																	
Sub-CPMK7	7			7	14	2																																																																	
Sub-CPMK8	4			3	7	1																																																																	
	41	21	14	24	100	14																																																																	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Teori dan Praktek Politik Lokal (3 SKS) mengkaji konsep desentralisasi, otonomi daerah, peta aktor, arena kekuasaan, serta dinamika relasi kekuasaan dan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah, dengan penekanan pada konteks empiris Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia sebagai laboratorium analisis. Mata kuliah ini diposisikan sebagai mata kuliah keahlian yang mengintegrasikan landasan teoritik (CPMK-1) dengan kemampuan analisis berbasis data (CPMK-2), perancangan strategi advokasi berbasis bukti dengan dukungan teknologi informasi dan platform SPBE (CPMK-3), hingga penyajian rekomendasi kebijakan dalam format policy brief yang akuntabel (CPMK-4), sehingga membentuk alur belajar yang progresif dari konsep menuju praktik nyata. Relevansinya dengan CPL yang dibebankan terletak pada pembentukan sikap berintegritas dan berkomitmen antikorupsi (CPL-01), kemampuan memanfaatkan data dan teknologi tata kelola digital (CPL-07), penerapan fungsi manajemen pemerintahan secara akuntabel (CPL-05), serta kapasitas berkomunikasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat lintas disiplin (CPL-09). Pembelajaran dirancang dengan pendekatan Case-Based Learning dan Project-Based Learning sesuai SN-Dikti Pasal 14 dan KPT 2024, di mana mahasiswa menganalisis kasus politik lokal secara kolaboratif dan menghasilkan deliverable nyata berupa laporan analisis aktor-arena serta policy brief yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis, selaras dengan nilai integritas, nasionalisme, dan pengabdian yang menjadi penciri lulusan program studi.																																																																						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar politik lokal; 2. Teori desentralisasi dan otonomi daerah; 3. Kerangka analisis aktor-arena kekuasaan; 4. Peta aktor politik daerah KTI;																																																																						

	5. Relasi kekuasaan dan patronase lokal; 6. Koalisi dan konflik elite daerah; 7. Studi kasus pilkada Sulawesi; 8. Analisis kebijakan berbasis data terbuka; 9. Pemanfaatan SPBE dalam tata kelola; 10. Strategi advokasi kebijakan daerah; 11. Pemberdayaan masyarakat berbasis bukti; 12. Penyusunan policy brief pemerintahan lokal.						
Pustaka	Utama :						
	(1) Mietzner, M. (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press; (2) Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon; (3) Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford University Press; (4) Mahmud, M. D. (2010). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers; (5) Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press; (6) Turner, M., & Hulme, D. (1997). Governance, Administration and Development: Making the State Work. Macmillan.						
	Pendukung :						
	(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (3) Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. Kajian Sistem Integritas Pemerintah Daerah. Jakarta: KPK RI; (4) Hikam, M.A.S. 1999. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES; (5) Azis, I.J. dan Widodo, T. 2010. Decentralization, Governance, and Economic Performance in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 11, No. 1.						
Dosen Pengampu	Purwanto, S.IP., M.Si.						
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar politik lokal,	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kerangka desentralisasi, dan otonomi daerah serta mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah di Indonesia.	- Menjelaskan pengertian politik lokal dan membedakannya dari politik nasional berdasarkan dimensi kewenangan, arena, dan aktor - Mengidentifikasi prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sesuai kerangka UU No. 23 Tahun 2014 - Menyebutkan minimal lima kategori aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah beserta peran formalnya - Menghubungkan konsep desentralisasi dengan konteks historis reformasi politik Indonesia pasca-1998	Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian berbasis refleksi lisan saat diskusi kelas (kemampuan mendefinisikan konsep kunci secara tepat dan memberi contoh konkret dari daerah di KTI) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons pertanyaan dosen selama sesi eksplorasi konsep; kesediaan berbagi pengetahuan awal tentang pemerintahan daerah di	Dosen membuka dengan memaparkan peta konsep politik lokal—desentralisasi—otonomi daerah menggunakan LCD proyektor; dilanjutkan tanya-jawab terbuka berbasis pertanyaan yang telah diunggah mahasiswa di forum LMS (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil (3-4 orang) untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam satu kasus pemerintahan daerah di KTI yang dipilih bersama; hasil pemetaan awal dipresentasikan secara lisan selama 3 menit per kelompok MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kasus pengantar tentang dinamika	Dosen mengunggah video pengantar singkat (10-15 menit) yang menjelaskan kontrak perkuliahan, peta jalan semester, dan pertanyaan pemantik tentang apa itu 'lokal' dalam politik Indonesia; menyediakan forum diskusi asinkron di LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh silabus dan bahan bacaan awal, menonton video pengantar, lalu menuliskan satu pertanyaan atau observasi awal tentang dinamika politik di daerah asal mereka di forum LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa diminta	- Pengertian dan ruang lingkup politik lokal; - Desentralisasi dan otonomi daerah: prinsip dan kerangka regulasi; - Aktor-aktor utama dalam arena kekuasaan pemerintahan daerah; - Reformasi politik Indonesia dan implikasinya bagi pemerintahan daerah; Pustaka: Hadiz (2010); Turner & Hulme (1997); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lingkungan sendiri menunjukkan nilai Integrity dan Nationalism Tugas: Tidak ada tugas mandiri yang dikumpulkan pada minggu ini; mahasiswa diminta membaca bahan pengantar sebelum pertemuan minggu 2	pemerintahan daerah di Sulawesi atau Maluku untuk mengoperasionalkan konsep aktor dan arena kekuasaan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa membaca bab-bab pengantar dari pustaka yang ditentukan dan menyiapkan catatan bacaan (reading note) yang memuat: (1) definisi operasional politik lokal menurut masing-masing penulis, (2) satu contoh kasus empiris yang dikutip penulis, dan (3) satu pertanyaan analitis yang muncul dari bacaan. Catatan ini menjadi bekal diskusi pada minggu 2. Deliverable: Catatan bacaan tertulis sepanjang 300-400 kata yang diunggah ke LMS sebelum pertemuan minggu 2,	mengidentifikasi satu peristiwa politik lokal yang pernah mereka amati (pilkada, sengketa kebijakan daerah, atau konflik aktor lokal) sebagai titik tolak eksplorasi konsep dasar Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mencakup tiga komponen di atas			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis (bobot 15%): 5 soal analisis singkat yang menguji kemampuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aktor serta menjelaskan relasi mereka dalam arena kekuasaan; kriteria penilaian mencakup ketepatan konsep, kelengkapan identifikasi aktor, dan kemampuan mengaitkan dengan kasus KTI	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi galeri presentasi (gallery walk): tiap kelompok menampilkan peta aktor di kertas plano atau tayangan; kelompok lain memberi umpan balik tertulis menggunakan lembar penilaian sejawat; dosen menutup dengan sintesis dan penguatan konsep arena kekuasaan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan peta aktor kelompok (5 menit per kelompok), menerima umpan balik, lalu merevisi peta secara langsung berdasarkan masukan; kuis tertulis dilaksanakan di akhir sesi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan bahan bacaan tambahan berupa artikel singkat tentang peta kekuasaan daerah di Sulawesi dan panduan teknis penyusunan actor mapping; membuka sesi konsultasi daring asinkron via LMS untuk kelompok yang memerlukan klarifikasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara berkelompok menyelesaikan peta aktor berbasis kasus yang telah dipilih pada minggu 1, menggunakan data dari portal pemerintah daerah atau sumber terbuka yang dapat diakses online; mengintegrasikan	Bahan Kajian: • Klasifikasi aktor politik daerah: formal, informal, dan masyarakat sipil; • Arena kekuasaan dan mekanisme interaksi antar-aktor; • Desentralisasi fiskal dan distribusi kekuasaan daerah; • Peta aktor politik daerah di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Hadiz (2010); Robison & Hadiz (2004); Turner & Hulme (1997); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Azis & Widodo (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi peta aktor kelompok: kejelasan argumen, kemampuan merespons pertanyaan, dan sikap menghargai perspektif kelompok lain sebagai cerminan nilai Harmony Tugas: Peta aktor (actor mapping) dalam format diagram atau matriks, dilengkapi narasi penjelasan 400-500 kata, dikumpulkan di akhir sesi atau diunggah ke LMS pada hari yang sama	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis mendalam kasus pemerintahan daerah konkret di KTI untuk menguji dan memperkuat pemahaman tentang struktur aktor dan arena kekuasaan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyusun peta aktor (actor mapping) untuk satu kabupaten atau kota di Sulawesi atau provinsi lain di KTI. Peta harus mencakup: (1) identifikasi minimal delapan aktor dengan kategori formal dan informal, (2) matriks kepentingan dan pengaruh tiap aktor, (3) hubungan antar-aktor (koalisi, persaingan, atau patronase), dan (4) narasi analisis yang mengaitkan	catatan bacaan dari minggu 1 ke dalam analisis MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: pengerjaan kolaboratif produk peta aktor berbasis data terbuka sebagai bagian dari proyek analisis politik lokal yang berlanjut hingga pertengahan semester Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				temuan dengan kerangka desentralisasi. Kasus yang dipilih harus berbeda antar kelompok untuk memperluas cakupan analisis kelas. Deliverable: Diagram peta aktor (satu halaman A3 atau setara) beserta narasi analisis 400-500 kata; diunggah ke LMS dalam format PDF pada hari pertemuan			
3,4	Sub-CPMK2: Membandingkan kerangka teori dan model analisis politik lokal (pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan pendekatan patron-klien) serta menerapkannya untuk membaca dinamika pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Mendeskripsikan asumsi dasar, unit analisis, dan kekuatan-kelemahan empat pendekatan teori politik lokal: pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan patron-klien • Membandingkan keempat pendekatan tersebut berdasarkan kriteria relevansinya untuk konteks	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian berbasis kualitas tabel perbandingan yang disusun kelompok (ketepatan deskripsi tiap teori, kedalaman perbandingan, dan relevansi dengan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi debat terstruktur: empat kelompok masing-masing membela satu pendekatan teori dan memperdebatkan relevansinya untuk kasus KTI; dosen menutup dengan sintesis yang menonjolkan komplementaritas antar-pendekatan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah matriks komparasi teori yang belum lengkap (partially completed matrix) sebagai scaffolding; menyediakan rekaman kuliah singkat (15 menit) yang menjelaskan empat pendekatan secara berurutan dengan contoh kasus Indonesia (via LMS; sinkron/asinkron).	Bahan Kajian: • Pendekatan pluralisme dalam analisis politik lokal; • Elitisme dan oligarki dalam pemerintahan daerah; • Neo-institusionalisme dan aturan main formal-informal; • Pendekatan patron-klien dan relasi	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		desentralisasi Indonesia • Mengidentifikasi pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan satu kasus dinamika pemerintahan daerah di KTI dengan memberikan justifikasi konseptual • Mengaitkan konsep modal sosial (social capital) dengan kapasitas demokrasi lokal di tingkat kabupaten atau kota	konteks KTI) Partisipasi kelas & laboratorium: Kemampuan berargumen secara kritis dalam debat teori antarkelompok; kesediaan merevisi posisi awal berdasarkan argumen lawan debat mencerminkan nilai Integrity dan Adaptability Tugas: Tabel perbandingan empat pendekatan teori beserta paragraf justifikasi pilihan pendekatan (250-300 kata), dikumpulkan di akhir sesi	Mahasiswa berdebat menggunakan bukti dari pustaka dan dari kasus peta aktor minggu 2; setelah debat, tiap kelompok merevisi matriks komparasi dan menambahkan paragraf justifikasi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: debat berbasis kasus sebagai metode SCL untuk mengoperasionalkan dan membandingkan kerangka teori secara kritis Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyusun tabel perbandingan empat pendekatan teori (pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, patron-klien) yang memuat kolom: asumsi dasar, unit analisis, variabel kunci,	Mekanisme & materi: Mahasiswa melengkapi matriks komparasi secara mandiri berdasarkan bacaan dari pustaka yang ditentukan; mengunggah draf matriks ke forum LMS untuk didiskusikan sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menggunakan kasus peta aktor yang telah disusun pada minggu 2 sebagai bahan uji untuk mengevaluasi daya terang tiap pendekatan teori Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	klientelisme lokal; • Modal sosial dan kapasitas demokrasi lokal; Pustaka: Robison & Hadiz (2004); Hadiz (2010); Putnam (1993); Mietzner (2013); Hikam (1999).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kekuatan, kelemahan, dan contoh penerapan di Indonesia. Tabel dilengkapi paragraf justifikasi yang menjelaskan mengapa satu pendekatan paling relevan untuk kasus yang telah dipetakan pada minggu 2. Tugas ini merupakan fondasi untuk analisis mendalam pada minggu 4. Deliverable: Tabel perbandingan (format spreadsheet atau tabel dokumen) beserta paragraf justifikasi 250-300 kata; diunggah ke LMS dalam format PDF atau DOCX sebelum pertemuan minggu 4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Esai analitis individual (bobot 15%); mahasiswa menganalisis satu kasus dinamika	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi pembahasan kasus bersama (plenary case discussion) di mana tiga hingga empat mahasiswa memaparkan draf argumen esai mereka untuk	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan panduan penulisan esai analitis beserta rubrik penilaian yang dapat diunduh di LMS; memberikan umpan balik tertulis atas draf tabel	Bahan Kajian: • Penerapan integratif kerangka teori pada kasus empiris KTI; • Relasi klientelisme dan patronase dalam	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			politik daerah di KTI menggunakan dua kerangka teori; kriteria penilaian meliputi ketepatan penerapan konsep teori (40%), kedalaman analisis komparatif (30%), penggunaan bukti empiris (20%), dan sistematika penulisan (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas kontribusi dalam sesi pembahasan kasus bersama: kedalaman argumen, kemampuan menghubungkan teori dengan data empiris, dan keterbukaan terhadap kritik	mendapat masukan kelas; dosen mensintesis keseluruhan diskusi dan menegaskan standar analisis yang akan menjadi acuan penilaian esai (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan argumen analitis utama esai secara lisan (3 menit per orang untuk mahasiswa yang dipilih secara acak), menerima umpan balik substantif dari dosen dan rekan, lalu merevisi argumen sebelum pengumpulan final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: pembahasan kasus bersama sebagai ruang uji argumen analitis individual sebelum pengumpulan esai final	komparasi minggu 3 yang diunggah mahasiswa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara individu memperdalam analisis kasus yang telah dikerjakan kelompok pada minggu-minggu sebelumnya, mencari data terbuka pendukung dari portal pemerintah daerah atau situs KPU yang dapat diakses online, lalu menyusun draf esai MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: penulisan esai analitis sebagai produk individual yang merupakan tahap pertama dari rangkaian proyek analisis politik lokal menuju UTS	pemerintahan daerah; • Dinamika oligarki lokal dan restrukturisasi kekuasaan pasca-reformasi; • Keterbatasan teori umum dalam konteks sosial-budaya KTI; Pustaka: Hadiz (2010); Robison & Hadiz (2004); Mietzner (2013); Putnam (1993); Mahmud (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebagai cerminan nilai Integrity dan Creativity Tugas: Esai analitis individual 600-800 kata yang mengintegrasikan tabel perbandingan teori dari minggu 3 ke dalam analisis kasus konkret; dikumpulkan paling lambat tiga hari setelah pertemuan	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun esai analitis yang menerapkan dua kerangka teori berbeda untuk membaca satu kasus dinamika pemerintahan daerah di KTI (dapat berupa kasus yang sama dengan peta aktor kelompok atau kasus baru yang dipilih mahasiswa). Esai harus memuat: (1) deskripsi singkat kasus, (2) penerapan kerangka teori pertama dan temuan analisisnya, (3) penerapan kerangka teori kedua dan temuan analisisnya, (4) perbandingan daya terang kedua pendekatan, dan (5) refleksi tentang keterbatasan teoritis dalam konteks KTI. Esai ini sekaligus berfungsi sebagai portofolio awal yang akan dikembangkan menuju penyusunan policy brief di paruh kedua	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				semester. Deliverable: Esai analitis individual 600-800 kata dalam format dokumen terstruktur (dengan subjudul), diunggah ke LMS dalam format PDF paling lambat tiga hari setelah pertemuan minggu 4			
5,6	Sub-CPMK3: Menganalisis pola relasi kekuasaan dan peta aktor politik lokal — mencakup koalisi, patronase, dan konflik elite — berdasarkan data empiris dari satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi aktor-aktor utama (eksekutif, legislatif, pengusaha, tokoh adat) beserta posisi dan kepentingannya dalam satu kabupaten/kota di Sulawesi berdasarkan data empiris • Menguraikan pola patronase dan relasi patron-klien yang beroperasi dalam sistem politik lokal kabupaten/kota yang dipilih menggunakan kerangka teori yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian formatif melalui lembar kerja analisis aktor yang diserahkan di akhir sesi, dinilai berdasarkan kelengkapan identifikasi aktor, ketepatan penerapan konsep patronase/koalisi, dan kesesuaian data empiris yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi diskusi pleno selama 30 menit untuk mengklarifikasi konsep patronase dan koalisi elite, dilanjutkan dengan pendampingan kelompok saat mahasiswa menyusun peta aktor berbasis data yang telah dikumpulkan, serta memberikan umpan balik langsung pada draft lembar kerja tiap kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi kuliah rekaman video pendek (15-20 menit) yang menjelaskan kerangka analisis relasi kekuasaan, patronase, dan tipologi koalisi elite daerah, disertai panduan pengumpulan data empiris (sumber: portal berita daerah, data KPU, dokumen DPRD) melalui LMS institusi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Pola relasi kekuasaan dan patron-klien dalam politik lokal Indonesia pasca-desentralisasi; • Reorganisasi kekuasaan oligarki di tingkat kabupaten/kota; • Tipologi koalisi elite daerah: programatik versus transaksional; • Sumber daya kekuasaan aktor lokal: ekonomi, jabatan, jaringan sosial, dan legitimasi kultural;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		relevan • Membedakan tipe-tipe koalisi elite daerah (koalisi programatik versus koalisi transaksional) berdasarkan bukti empiris dari studi kasus • Menganalisis sumber daya kekuasaan yang digunakan aktor untuk mempertahankan dominasi atau membangun jaringan patronase di daerah kajian • Menghubungkan temuan empiris lokal dengan konsep oligarki dan reorganisasi kekuasaan pasca-Orde Baru sesuai perspektif teoretis	dikutip Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok Case-Based Learning dinilai dari frekuensi kontribusi substantif, kemampuan mengajukan argumen berbasis data, dan sikap mendengarkan serta merespons pendapat sejawat secara kritis dan santun (mencerminkan nilai Harmony dan Integrity) Tugas: Lembar kerja peta aktor sementara (format tabel + narasi singkat maks. 500 kata)	Mahasiswa dalam kelompok (3-4 orang) mempresentasikan temuan awal peta aktor kabupaten/kota Sulawesi pilihan masing-masing di depan kelompok lain, kemudian berdiskusi untuk mengidentifikasi celah data dan memperkuat argumentasi teoretis sebelum menyempurnakan lembar kerja akhir MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kelompok dan pleno berbasis studi kasus empiris satu kabupaten/kota di Sulawesi; mahasiswa memetakan jaringan aktor, sumber daya kekuasaan, dan pola patronase menggunakan data yang dikumpulkan, dipandu rubrik analisis aktor-arena	Mahasiswa mengakses video kuliah dan bahan bacaan wajib, kemudian secara mandiri mengumpulkan data awal (berita, laporan, dokumen resmi) mengenai peta aktor di kabupaten/kota Sulawesi yang dipilih kelompoknya, dan mengisi lembar kerja pra-diskusi yang diunggah ke LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah kasus nyata politik lokal satu kabupaten/kota di Sulawesi secara daring, mengidentifikasi aktor dan jaringan kekuasaan melalui penelusuran data terbuka (data.go.id, situs KPU, portal berita daerah) sebagai fondasi analisis kelompok	Pustaka: Robison & Hadiz (2004); Hadiz (2010); Mietzner (2013).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			yang mendokumentasikan minimal 5 aktor, sumber daya kekuasaan, dan hubungan patronase antar-aktor; dikumpulkan sebagai draft untuk disempurnakan di Minggu 6	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (3-4 mahasiswa) memilih satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi dan menyusun draft peta aktor politik lokal. Tugas mencakup: (1) identifikasi minimal 5 aktor utama beserta sumber daya kekuasaan dan kepentingannya, (2) penggambaran pola relasi patronase antar-aktor dalam format tabel atau diagram sederhana, dan (3) narasi singkat yang menghubungkan temuan dengan konsep patronase dan reorganisasi kekuasaan. Draft ini menjadi bahan kerja yang akan dikembangkan dan dipresentasikan pada Minggu 6. Deliverable: Draft lembar kerja peta aktor (1 file dokumen per kelompok) berisi tabel identifikasi	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				aktor, diagram/matriks relasi kekuasaan, dan narasi analisis maks. 500 kata, diunggah ke LMS paling lambat 24 jam setelah sesi luring Minggu 5			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tes tertulis akhir sesi (bobot 14%): kisi-kisi mencakup kemampuan menganalisis pola relasi kekuasaan, mengidentifikasi tipe koalisi/konflik elite, dan menerapkan konsep patronase pada kasus empiris Sulawesi; soal essay analitis (2-3 soal), dinilai berdasarkan ketajaman analisis,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok secara bergiliran, memberikan umpan balik konstruktif setelah setiap presentasi, memimpin diskusi pleno untuk mengidentifikasi pola lintas kasus dari berbagai kabupaten/kota Sulawesi yang dikaji, dan mengkonsolidasi temuan kelas menjadi gambaran umum peta kekuasaan politik lokal Sulawesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok mempresentasikan analisis peta aktor final (pola	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membagikan rubrik penilaian presentasi dan panduan pendalaman analisis konflik elite melalui LMS, serta menyediakan sesi konsultasi daring (via video call atau forum diskusi LMS) bagi kelompok yang memerlukan klarifikasi sebelum presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyempurnakan draft peta aktor dari Minggu 5 berdasarkan umpan balik dosen, melengkapi data konflik dan koalisi elite	Bahan Kajian: • Dinamika pembentukan dan perpecahan koalisi elite di pemerintahan daerah; • Konflik elite lokal: akar, eskalasi, dan resolusi dalam konteks Sulawesi; • Modal sosial dan jaringan sipil sebagai penyeimbang patronase elite; • Implikasi koalisi transaksional terhadap kualitas kebijakan dan tata kelola daerah; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penggunaan konsep yang tepat, dan dukungan data/contoh konkret Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi kelompok dinilai dari kelengkapan peta aktor, ketepatan penggunaan kerangka analisis, kemampuan merespons pertanyaan, serta sikap kritis dan kolaboratif selama sesi tanya-jawab (mencerminkan nilai Integrity dan Adaptability) Tugas:	koalisi, patronase, dan konflik elite) kabupaten/kota Sulawesi yang dikaji, merespons pertanyaan kritis dari kelompok lain dan dosen, serta mencatat persamaan dan perbedaan pola kekuasaan antar-daerah sebagai bahan refleksi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis presentasi: tiap kelompok menyajikan dan mempertahankan analisis kasus empiris di hadapan kelas; diikuti diskusi komparatif lintas kasus untuk menemukan pola umum relasi kekuasaan, patronase, dan konflik elite di Sulawesi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mempresentasikan analisis	dari sumber terbuka, serta menyiapkan slide presentasi kelompok yang siap ditampilkan pada sesi luring Minggu 6 MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok memperdalam analisis kasus kabupaten/kota Sulawesi pilihan dengan fokus pada dinamika koalisi dan konflik elite, mengintegrasikan data empiris baru ke dalam peta aktor yang telah disusun pada Minggu 5 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Hadiz (2010); Mietzner (2013); Robison & Hadiz (2004); Putnam (1993).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Presentasi kelompok (10-12 menit per kelompok + 5 menit tanya-jawab) disertai slide ringkasan analisis (maks. 12 slide) yang menampilkan peta aktor final, diagram koalisi/konflik, dan temuan kritis; file slide dikumpulkan ke LMS pada hari yang sama setelah presentasi	komprehensif peta aktor dan relasi kekuasaan kabupaten/kota Sulawesi yang dipilih, mencakup: (1) peta aktor final dengan sumber daya dan kepentingan tiap aktor, (2) pola koalisi dan dinamika konflik elite beserta bukti empirisnya, (3) analisis peran patronase dalam membentuk atau memecah koalisi, dan (4) penilaian kritis terhadap implikasi pola tersebut bagi tata kelola daerah. Presentasi menggabungkan temuan Minggu 5 yang telah disempurnakan dengan pendalaman analisis koalisi dan konflik elite. Deliverable: File slide presentasi kelompok (maks. 12 slide, format PDF/PPTX) yang memuat peta aktor final, diagram koalisi/konflik, narasi analisis berbasis data empiris, dan daftar sumber; diunggah ke LMS			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pada hari sesi presentasi berlangsung			
7	Sub-CPMK4: Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data atas satu kasus empiris politik lokal di Kawasan Timur Indonesia sebagai kulminasi kajian pra-UTS.	Mahasiswa mampu: - Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur secara akademis — mencakup latar belakang, kerangka analisis, temuan empiris, dan kesimpulan — atas satu kasus politik lokal di Kawasan Timur Indonesia - Mengintegrasikan seluruh konsep yang dipelajari pada Minggu 1-6 (desentralisasi, aktor-arena, patronase, koalisi, konflik elite) ke dalam satu narasi analitis yang koheren dan tidak tumpang-tindih - Memvalidasi argumen analisis dengan mengutip minimal tiga sumber	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian difokuskan pada laporan tertulis (bobot 7%): dinilai berdasarkan empat aspek — (1) kelengkapan dan kedalaman analisis aktor-arena (35%), (2) koherensi penggunaan kerangka teoretis dari Minggu 1-6 (30%), (3) kualitas dan keterlacakan data empiris yang digunakan (25%), dan (4) sistematika dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi reviu dan penguatan (30 menit) yang merangkum kerangka analisis aktor-arena secara utuh sebagai panduan penulisan laporan, dilanjutkan dengan sesi peer-review terstruktur di mana mahasiswa saling memberikan umpan balik pada draf laporan menggunakan rubrik yang disediakan, dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab individual dengan dosen (tatap muka di kelas). MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan peer-review: mahasiswa menyempurnakan laporan analisis aktor-arena berdasarkan umpan balik	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membagikan panduan penulisan laporan analisis aktor-arena (template sistematika, rubrik penilaian terperinci, dan contoh anotasi pustaka) melalui LMS, serta membuka forum tanya-jawab daring bagi mahasiswa yang memerlukan klarifikasi teknis penulisan atau konsultasi argumen (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara mandiri mengkonsolidasi seluruh temuan dari Minggu 1-6, melengkapi data yang masih kurang, dan mulai menyusun draf laporan individual sesuai panduan yang diberikan; mahasiswa dapat	Bahan Kajian: - Sintesis kerangka analisis aktor-arena kekuasaan: integrasi konsep Minggu 1-6; - Sistematika dan standar penulisan laporan analisis politik lokal berbasis data empiris; - Refleksi kritis atas keterbatasan analisis dan agenda riset politik lokal Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Hadiz (2010); Robison & Hadiz (2004); Mietzner (2013); Turner & Hulme (1997); Putnam (1993).	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pustaka yang relevan serta data empiris yang dapat ditelusuri (dokumen resmi, berita terverifikasi, data KPU) • Mengevaluasi keterbatasan data dan analisis secara reflektif serta mengidentifikasi pertanyaan riset lanjutan yang dapat dikembangkan pasca-UTS • Menyajikan laporan dalam format dan sistematika penulisan akademis yang sesuai standar ilmu politik, menggunakan bahasa Indonesia baku dan rujukan yang konsisten	kejelasan penulisan akademis (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kehadiran dan kontribusi aktif dalam sesi reвью bersama dinilai dari kemampuan menerima dan memberikan umpan balik konstruktif antarsejawat secara jujur dan menghargai kerja kolektif (mencerminkan nilai Integrity dan Service) Tugas: Laporan analisis aktor-arena individual (bukan kelompok) maks. 2.000 kata (tidak termasuk daftar	terstruktur dari sejawat dan dosen; proses reвью mendorong refleksi kritis atas kecukupan data, koherensi argumen, dan ketelitian penulisan akademis Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap mahasiswa menyusun laporan analisis aktor-arena individual atas satu kasus empiris politik lokal di Kawasan Timur Indonesia (dapat mengembangkan kasus yang dikaji bersama kelompok pada Minggu 5-6, namun analisis dan penulisan bersifat mandiri). Laporan harus mengintegrasikan konsep desentralisasi, aktor-arena kekuasaan, patronase, koalisi, dan konflik elite yang dipelajari sepanjang Minggu 1-6; memuat peta aktor yang disertai data empiris terverifikasi;	mengunggah draf awal ke forum LMS untuk mendapatkan umpan balik sejawat sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengerjakan proyek laporan analisis aktor-arena sebagai produk kulminasi kajian pra-UTS, mengintegrasikan proses analisis bertahap dari Minggu 1-6 ke dalam satu laporan akademis yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pustaka dan lampiran), dengan sistematika: pendahuluan, kerangka analisis, temuan empiris (peta aktor, relasi kekuasaan, patronase/koalisi/konflik), diskusi kritis, dan kesimpulan; dilengkapi minimal satu tabel atau diagram peta aktor	mendiskusikan keterbatasan analisis; serta mengajukan pertanyaan riset lanjutan yang relevan. Laporan mencerminkan kemampuan sintesis dan penalaran analitis mahasiswa sebagai persiapan UTS. Deliverable: Laporan analisis aktor-arena individual dalam format dokumen (PDF), maks. 2.000 kata di luar daftar pustaka dan lampiran, memuat sistematika lengkap (pendahuluan, kerangka analisis, temuan empiris dengan tabel/diagram peta aktor, diskusi kritis, kesimpulan, daftar pustaka minimal 3 sumber), diunggah ke LMS paling lambat tiga hari setelah sesi luring Minggu 7			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester : Cakupan: Sub-CPMK1–Sub-CPMK4						
9,10	Sub-CPMK5: Mengidentifikasi isu politik	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	lokal yang urgen dan merumuskan problem statement advokasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data terbuka dan platform SPBE yang tersedia.	• Mengidentifikasi minimal tiga isu politik lokal yang urgen di Kawasan Timur Indonesia menggunakan data dari portal data.go.id dan portal SPBE daerah • Memilah data terbuka yang relevan dan kredibel sebagai landasan evidensial rumusan masalah kebijakan • Merumuskan problem statement advokasi kebijakan secara terstruktur dengan komponen: isu, bukti empirik, aktor terdampak, dan urgensi intervensi • Membedakan isu yang dapat ditangani melalui advokasi kebijakan daerah dari isu yang berada di luar	Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif minggu ini; penilaian dipusatkan pada kualitas draft problem statement yang dihasilkan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi penelusuran data kelompok: ketepatan memilih sumber data, kontribusi argumen berbasis bukti, dan keterbukaan menerima umpan balik rekan (nilai integritas akademik) Tugas:	Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (20 menit) tentang kerangka analisis kebijakan berbasis bukti dan cara membaca data SPBE; memfasilitasi diskusi kelompok kecil (4-5 mahasiswa) untuk memetakan isu lokal, lalu memimpin pleno perbandingan temuan antar kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok menggunakan laptop untuk mengakses data terbuka, mengisi bersama lembar pemetaan isu (problem mapping), dan mempresentasikan kandidat isu secara singkat kepada kelas untuk mendapat masukan MP — Metode Pembelajaran:	Dosen mengunggah panduan penelusuran portal data terbuka (data.go.id, portal SPBE daerah, situs KPU) dan template analisis isu kebijakan ke LMS sebelum sesi; memberikan umpan balik asinkron atas draft awal via forum diskusi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelusuri mandiri portal data terbuka untuk mengidentifikasi isu politik lokal KTI, mengisi lembar kerja analisis isu (problem mapping worksheet) secara daring, dan mengunggah draft problem statement ke LMS MP — Metode Pembelajaran:	• Analisis kebijakan berbasis data terbuka; • Pemanfaatan SPBE dalam tata kelola daerah; • Kerangka identifikasi isu dan problem statement advokasi; Pustaka: Turner & Hulme (1997); Azis & Widodo (2010); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Komisi Pemberantasan Korupsi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kewenangan pemerintah daerah	Draft problem statement advokasi (individual, 300-500 kata) yang memuat: identifikasi isu, bukti data terbuka yang dikutip, aktor terdampak, dan pernyataan urgensi intervensi kebijakan	Case-Based Learning: kelompok menganalisis data aktual tata kelola daerah (anggaran, pelayanan publik, atau partisipasi pemilu KTI) untuk merumuskan isu kebijakan yang konkret dan terukur Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap mahasiswa menelusuri minimal dua portal data terbuka (data.go.id, portal SPBE kabupaten/kota/provinsi KTI, atau portal KPU) untuk menemukan satu isu politik lokal yang urgen, kemudian menyusun draft problem statement advokasi yang mencakup: identifikasi isu beserta indikator kuantitatifnya, kutipan data terbuka sebagai bukti, pemetaan aktor yang terdampak, dan pernyataan mengapa isu tersebut memerlukan	Case-Based Learning: mahasiswa menelaah satu kasus nyata tata kelola daerah KTI yang datanya tersedia di portal terbuka, kemudian mengidentifikasi celah kebijakan yang menjadi akar masalah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				intervensi kebijakan. Draft ini menjadi fondasi tugas minggu 10. Deliverable: Dokumen draft problem statement advokasi (300-500 kata) yang dilengkapi tautan atau tangkapan layar data terbuka yang dirujuk, dikumpulkan via LMS sebelum sesi minggu 10			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tes tertulis formatif (30 menit): mahasiswa menganalisis satu kasus isu kebijakan daerah fiktif yang disediakan dosen, kemudian merumuskan problem statement advokasi secara mandiri; dinilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi gallery walk: setiap kelompok memajang poster ringkasan problem statement-nya; kelompok lain memberikan umpan balik tertulis menggunakan sticky note yang dikategorikan (kekuatan/kelemahan/saran); dosen memimpin sintesis pleno dan menegaskan kriteria problem statement yang memenuhi standar advokasi (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka forum peer review daring di LMS, memberikan panduan rubrik penilaian problem statement, dan memberikan umpan balik tertulis atas revisi kelompok secara asinkron (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunggah draft problem statement minggu 9 ke forum LMS, memberikan umpan balik	Bahan Kajian: • Analisis kebijakan berbasis data terbuka; • Pemanfaatan SPBE dalam tata kelola daerah; • Strategi advokasi kebijakan daerah; Pustaka: Turner & Hulme (1997); Azis & Widodo (2010); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dari kelengkapan komponen, keakuratan data, dan kesesuaian dengan kewenangan daerah (bobot 14%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas umpan balik peer review: argumen yang diberikan berbasis bukti, bukan opini; ketepatan mengidentifikasi kelemahan problem statement rekan; sikap menghargai perbedaan perspektif (nilai integritas dan harmoni ICHSA-N) Tugas:	kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bergilir membaca poster kelompok lain, menuliskan umpan balik berbasis rubrik, lalu kembali ke poster kelompok sendiri untuk mengintegrasikan masukan sebelum menyusun versi final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: gallery walk sebagai simulasi konsultasi publik awal, melatih kemampuan mengkomunikasikan isu kebijakan secara ringkas dan menerima kritik konstruktif dari beragam perspektif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	terstruktur kepada dua kelompok lain menggunakan rubrik, kemudian merevisi dokumen berdasarkan masukan yang diterima MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: proses peer review daring mensimulasikan mekanisme konsultasi kebijakan di mana argumen harus dipertahankan secara logis dan berbasis data Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Komisi Pemberantasan Korupsi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Problem statement advokasi final (kelompok, 500-700 kata) yang memuat seluruh komponen yang telah direvisi berdasarkan umpan balik peer review dan diskusi pleno; dilampiri lembar jejak revisi	Kelompok merevisi draft problem statement minggu 9 berdasarkan umpan balik peer review (daring dan luring), kemudian menyusun versi final yang siap dijadikan fondasi strategi advokasi pada minggu 11-12. Revisi wajib mencakup: penguatan bukti data terbuka, penyesuaian dengan kewenangan daerah berdasarkan UU 23/2014, dan kejelasan orientasi solusi. Lembar jejak revisi dilampirkan untuk menunjukkan proses perbaikan yang transparan (mencerminkan nilai integritas ICHSA-N). Deliverable: Dokumen problem statement advokasi final (500-700 kata) beserta lembar jejak revisi yang menunjukkan perubahan dari draft awal dan alasan revisi; dikumpulkan via LMS paling lambat hari sebelum sesi minggu 11			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11,12	Sub-CPMK6: Merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin melalui simulasi presentasi advokasi.	Mahasiswa mampu: - Merancang strategi advokasi kebijakan yang memuat: tujuan advokasi, target pemangku kepentingan, pesan kunci, saluran komunikasi, dan tahapan aksi berbasis problem statement final yang telah disusun - Memetakan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dengan membedakan posisi, kepentingan, dan tingkat pengaruh masing-masing aktor terhadap isu yang diadvokasinya - Memilih pendekatan advokasi yang sesuai dengan konteks politik lokal KTI, termasuk mempertimbangkan jaringan patronase dan struktur kekuasaan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif minggu ini; penilaian dipusatkan pada kualitas rancangan strategi advokasi yang dihasilkan kelompok Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam workshop perancangan strategi: kemampuan mengusulkan langkah advokasi yang realistis, kesediaan mengadaptasi strategi berdasarkan konteks lokal, dan kolaborasi lintas	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (20 menit) tentang komponen strategi advokasi kebijakan dan contoh advokasi yang berhasil di konteks KTI; memfasilitasi workshop kelompok (60 menit) di mana setiap kelompok mengerjakan stakeholder map dan draft strategi menggunakan kanvas cetak; menutup dengan sesi konsultasi keliling antar kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan stakeholder mapping secara visual di kertas plano, mendiskusikan posisi dan kepentingan tiap aktor, lalu menuangkan hasil ke dalam template strategi advokasi digital untuk disempurnakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template strategi advokasi kebijakan dan contoh dokumen advokasi dari konteks pemerintahan daerah Indonesia ke LMS; membuka sesi konsultasi asinkron via forum untuk kelompok yang memerlukan klarifikasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempelajari template dan contoh secara mandiri, kemudian berkolaborasi dalam kelompok (via platform kolaborasi daring) untuk menyusun draft awal stakeholder map dan pesan kunci sebelum sesi luring	Bahan Kajian: - Strategi advokasi kebijakan daerah; - Pemberdayaan masyarakat berbasis bukti; - Peta aktor politik daerah KTI; - Relasi kekuasaan dan patronase lokal; Pustaka: Hadiz (2010); Turner & Hulme (1997); Putnam (1993); Hikam (1999); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		daerah yang ada • Menyusun pesan advokasi yang adaptif untuk audiens yang berbeda: legislatif, eksekutif daerah, dan masyarakat sipil	perspektif dalam kelompok (nilai adaptabilitas dan kreativitas ICHSA-N) Tugas: Draft dokumen strategi advokasi (kelompok, 600-900 kata) yang memuat komponen lengkap: tujuan, stakeholder map, pesan kunci per segmen audiens, saluran komunikasi, dan tahapan aksi	sebelum minggu 12 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: workshop strategi advokasi berbasis kanvas, mensimulasikan proses perencanaan advokasi yang digunakan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi kebijakan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok mengembangkan dokumen strategi advokasi kebijakan yang komprehensif berdasarkan problem statement final dari minggu 10. Strategi harus mencerminkan pemahaman tentang konteks politik lokal KTI, termasuk dinamika patronase dan relasi kekuasaan yang relevan.	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: perancangan strategi advokasi sebagai produk nyata yang akan disimulasikan pada minggu 12; setiap keputusan desain harus dapat dipertanggungjawabkan secara evidensial Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Strategi juga perlu menunjukkan nilai adaptabilitas dalam memilih pendekatan yang realistis sesuai kapasitas aktor daerah. Dokumen ini menjadi bahan yang dipresentasikan dalam simulasi advokasi minggu 12. Deliverable: Dokumen strategi advokasi (600-900 kata) yang dilengkapi stakeholder map visual (diagram atau tabel), dikumpulkan via LMS sebelum sesi minggu 12			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Simulasi presentasi advokasi (15 menit per kelompok: 10 menit paparan dan 5 menit tanya-jawab): dinilai dari kejelasan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi simulasi panel advokasi: setiap kelompok mempresentasikan strategi advokasi kepada panel yang terdiri dari kelompok mahasiswa lain yang berperan sebagai legislatif daerah, eksekutif daerah, dan perwakilan masyarakat sipil; dosen bertindak	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian simulasi advokasi ke LMS sebelum sesi; setelah sesi luring, membuka forum diskusi reflektif di mana mahasiswa berbagi pembelajaran dari simulasi dan mendapat umpan balik dosen secara asinkron (via	Bahan Kajian: • Strategi advokasi kebijakan daerah; • Pemberdayaan masyarakat berbasis bukti; • Penyusunan policy brief pemerintahan lokal;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			problem statement, kualitas strategi advokasi, kemampuan mempertahankan argumen berbasis data, dan adaptasi pesan kepada audiens; bobot 14% dari nilai akhir mata kuliah Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas partisipasi sebagai audiens simulasi: ketajaman pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain, relevansi umpan balik yang diberikan, dan sikap menghargai proses demokratis dalam advokasi kebijakan (nilai harmoni dan service ICHSA-	sebagai moderator dan penilai utama; pleno penutup membahas pola kekuatan dan kelemahan yang muncul lintas kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa yang berperan sebagai audiens panel menggunakan rubrik untuk mencatat penilaian dan menyiapkan minimal satu pertanyaan kritis berbasis kepentingan peran yang dimainkan; setelah semua presentasi selesai, setiap kelompok menerima umpan balik tertulis dari panel MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning berbasis simulasi panel advokasi: mereplikasi mekanisme presentasi kebijakan kepada pemangku kepentingan	LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempersiapkan materi presentasi (slide atau media visual lain) secara kolaboratif daring, berlatih dalam kelompok virtual, dan mengisi formulir self-assessment sebelum hari simulasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: persiapan presentasi advokasi sebagai tahap akhir siklus proyek yang dimulai dari identifikasi isu (minggu 9), perumusan masalah (minggu 10), dan perancangan strategi (minggu 11) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Turner & Hulme (1997); Putnam (1993); Hadiz (2010); Hikam (1999); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			N) Tugas: Laporan refleksi pasca-simulasi (individual, 400-600 kata) yang menganalisis: apa yang berjalan efektif dalam strategi kelompok sendiri, apa yang perlu diperbaiki, dan satu pelajaran dari presentasi kelompok lain yang dapat diadaptasi	nyata, melatih kompetensi komunikasi politik dan advokasi yang relevan dengan praktik tata kelola daerah KTI Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setelah mengikuti simulasi panel advokasi, setiap mahasiswa menyusun laporan refleksi individual yang menganalisis secara kritis efektivitas strategi advokasi kelompok sendiri, mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat, dan mengambil satu pelajaran konkret dari presentasi kelompok lain. Refleksi harus menunjukkan kemampuan berpikir evaluatif (bukan sekadar deskriptif) dan mengaitkan pengalaman simulasi dengan konsep strategi advokasi yang dipelajari selama minggu 9-12. Nilai nasionalisme ICHSA-N diwujudkan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				melalui orientasi advokasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal KTI. Deliverable: Laporan refleksi individual (400-600 kata) yang memuat: evaluasi kritis strategi kelompok sendiri, satu aspek yang perlu direvisi beserta alasan berbasis teori, dan satu pelajaran dari kelompok lain; dikumpulkan via LMS paling lambat tiga hari setelah sesi simulasi			
13,14	Sub-CPMK7: Menyusun policy brief yang akuntabel dan beretika atas isu politik lokal yang dikaji, mencerminkan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan secara kolaboratif.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi isu politik lokal yang relevan dari hasil kajian sebelumnya dan merumuskannya sebagai masalah kebijakan yang spesifik dan terukur • Menyusun kerangka policy brief secara kolaboratif yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian formatif berbasis review antarpasangan (peer review) terhadap draf policy brief: kesesuaian struktur, relevansi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi klinik penulisan policy brief: memaparkan anatomi policy brief akuntabel (masalah, bukti, rekomendasi, nilai etis), kemudian membimbing tiap kelompok secara bergiliran dalam merumuskan posisi kebijakan (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mempublikasikan panduan penulisan policy brief berbasis OGP (Open Government Partnership) dan contoh policy brief antikorupsi daerah KTI melalui LMS; membuka forum diskusi daring untuk konsultasi pemilihan isu (via LMS;	Bahan Kajian: • Penyusunan policy brief pemerintahan lokal; • Strategi advokasi kebijakan daerah; • Analisis kebijakan berbasis data terbuka; Pustaka:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memuat latar belakang masalah, analisis bukti, dan posisi rekomendasi yang beretika • Mengintegrasikan prinsip antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan secara eksplisit dalam bagian rekomendasi kebijakan yang dihasilkan • Mengevaluasi kesesuaian antara data yang digunakan sebagai dasar rekomendasi dengan standar akuntabilitas dan integritas kelembagaan • Menunjukkan kemampuan kolaborasi lintas perspektif dalam kelompok dengan pembagian peran yang jelas dan terdokumentasi	isu, dan ketajaman analisis masalah kebijakan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi diskusi kelompok berbasis kasus; kontribusi argumentatif yang menunjukkan integritas dan perspektif kebangsaan; bukan sekadar hadir Tugas: Draf awal policy brief (2-3 halaman A4, spasi 1,5) memuat: judul isu, rumusan masalah, ringkasan bukti, dan rancangan rekomendasi;	kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun draf awal policy brief di dalam kelas; antar kelompok melakukan review singkat menggunakan rubrik peer review yang disediakan dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: tiap kelompok menggunakan kasus nyata politik lokal KTI (Sulawesi, Maluku, atau Papua) sebagai konteks penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan beretika Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelusuri data terbuka (data.go.id, portal SPBE daerah, situs KPU) untuk mengidentifikasi isu kebijakan yang akan dijadikan fokus policy brief; mendokumentasikan sumber data dalam lembar kerja digital MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok menyepakati isu politik lokal, menyusun kerangka argumen kebijakan, dan membagi peran penulisan secara daring melalui dokumen kolaboratif	Turner & Hulme (1997); Mahmud (2010); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dikumpulkan akhir sesi sebagai bahan revisi minggu berikutnya	Setiap kelompok (3-4 orang) menyusun draf awal policy brief atas satu isu politik lokal yang disepakati bersama dosen, menggunakan minimal dua sumber data terbuka yang dapat diverifikasi; draf harus memuat pernyataan masalah, ringkasan bukti empiris, dan posisi rekomendasi yang mencerminkan nilai antikorupsi dan kebangsaan; dilengkapi catatan pembagian peran anggota kelompok Deliverable: Draf policy brief 2-3 halaman A4 (format dokumen pengolahan kata) disertai lembar pembagian peran kelompok dan daftar sumber data; dikumpulkan melalui LMS sebelum sesi minggu ke-14	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi peer review terstruktur	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi konsultasi daring	Bahan Kajian:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tidak ada tes tertulis; penilaian sumatif (14%) atas policy brief final berbasis rubrik empat dimensi: (1) ketajaman rumusan masalah kebijakan, (2) kualitas dan akuntabilitas bukti yang digunakan, (3) operasionalitas dan etika rekomendasi, (4) kualitas kolaborasi yang tercermin dalam catatan proses Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi substantif dalam sesi peer review antarpasangan kelompok: argumentasi penilaian harus	antar kelompok: tiap kelompok mempresentasikan policy brief final secara singkat (5 menit), kelompok lain memberikan penilaian menggunakan rubrik; dosen memberikan penguatan dan umpan balik menyeluruh di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa melaksanakan sesi peer review menggunakan lembar rubrik yang disediakan; mencatat masukan yang diterima dan mendiskusikan perbaikan akhir dalam kelompok sebelum pengumpulan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan peer review: setiap kelompok bertindak sebagai pemberi masukan kebijakan berbasis kasus	(sinkron singkat atau forum LMS) untuk kelompok yang membutuhkan klarifikasi akhir sebelum pengumpulan final; mempublikasikan rubrik penilaian sumatif secara transparan di LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyelesaikan revisi policy brief secara kolaboratif melalui dokumen bersama; mendokumentasikan perubahan dari draf awal ke versi final sebagai catatan refleksi proses kolaborasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menuntaskan siklus penuh produksi policy brief dari identifikasi isu hingga	• Penyusunan policy brief pemerintahan lokal; • Strategi advokasi kebijakan daerah; • Pemberdayaan masyarakat berbasis bukti; Pustaka: Turner & Hulme (1997); Mahmud (2010); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023); Putnam (1993); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berbasis rubrik, bukan opini pribadi; sikap menerima kritik dan memberikan masukan secara konstruktif dinilai sebagai cerminan nilai integritas Tugas: Policy brief final 4-6 halaman A4 (spasi 1,5, font 12) memuat: judul, ringkasan eksekutif, rumusan masalah, analisis bukti, rekomendasi operasional, dan pernyataan nilai etis; disertai catatan revisi dari draf minggu ke-13 dan lembar kontribusi anggota	nyata, mensimulasikan proses advokasi kebijakan yang akuntabel sebagaimana berlaku pada lembaga think tank atau LSM daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mengumpulkan policy brief final yang telah direvisi berdasarkan umpan balik minggu ke-13 dan sesi peer review; rekomendasi kebijakan wajib bersifat operasional (mencantumkan aktor yang bertanggung jawab, mekanisme implementasi, dan indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi) serta secara eksplisit mencerminkan komitmen antikorupsi dan nilai kebangsaan; catatan proses revisi wajib disertakan sebagai bukti kolaborasi	rekomendasi final yang siap diserahkan kepada pemangku kepentingan hipotetis daerah KTI Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Policy brief final 4-6 halaman A4 (PDF) disertai: (1) catatan revisi komparatif draf ke final, (2) lembar kontribusi anggota yang ditandatangani, dan (3) formulir peer review yang telah diisi; dikumpulkan melalui LMS pada hari yang sama setelah sesi luring			
15	Sub-CPMK8: Mempresentasikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dan merefleksikan pembelajaran serta komitmen integritas diri dalam peran tim lintas disiplin melalui presentasi final dan jurnal refleksi.	Mahasiswa mampu: • Mempresentasikan hasil kajian politik lokal secara sistematis dan persuasif kepada audiens akademik, mencakup temuan analisis, policy brief, dan rekomendasi yang telah disusun sepanjang semester • Mempertahankan argumen kajian secara kritis dalam sesi tanya jawab dengan mendemonstrasikan penguasaan konsep dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian sumatif (7%) berbasis dua komponen: (1) kualitas presentasi final kelompok dinilai menggunakan rubrik empat aspek (sistematika, penguasaan materi, kemampuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi final seluruh kelompok secara bergiliran; memimpin sesi tanya jawab kritis setelah tiap presentasi; di akhir perkuliahan menyampaikan umpan balik integratif yang merangkum capaian pembelajaran kolektif dan mengaitkannya dengan peran mahasiswa sebagai calon praktisi kebijakan di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mempublikasikan panduan jurnal refleksi dan rubrik presentasi final melalui LMS; menyediakan template jurnal refleksi terstruktur yang memandu mahasiswa mengaitkan pengalaman belajar dengan komitmen integritas (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyiapkan bahan presentasi final	Bahan Kajian: • Penyusunan policy brief pemerintahan lokal; • Strategi advokasi kebijakan daerah; • Pemberdayaan masyarakat berbasis bukti; • Peta aktor politik daerah KTI; Pustaka: Hadiz (2010); Mietzner (2013); Turner & Hulme	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		data yang digunakan • Menampilkan kolaborasi tim lintas perspektif yang efektif melalui pembagian peran presentasi yang proporsional dan terdokumentasi • Merefleksikan perkembangan pemahaman pribadi tentang politik lokal dan mengartikulasikan komitmen integritas diri dalam peran sebagai analis atau praktisi kebijakan melalui jurnal refleksi tertulis • Mengevaluasi kontribusi diri sendiri dan anggota tim sepanjang proyek semester dengan jujur dan konstruktif dalam catatan refleksi individual	menjawab pertanyaan, efektivitas komunikasi visual); (2) kualitas jurnal refleksi individual dinilai berdasarkan kedalaman refleksi, kejujuran evaluasi diri, dan kejelasan komitmen integritas yang diartikulasikan Partisipasi kelas & laboratorium: Keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab antarpresentasi: kualitas pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan sikap menghargai	Mekanisme & materi: Mahasiswa melaksanakan presentasi final kelompok (10-12 menit per kelompok) menggunakan media visual; mengajukan pertanyaan kritis kepada kelompok lain; menyerahkan jurnal refleksi individual secara fisik atau melalui LMS MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi publik simulatif: kelompok mensimulasikan forum diseminasi kebijakan daerah di hadapan audiens akademik, melatih kecakapan advokasi yang akan dibutuhkan dalam praktik nyata pemerintahan lokal Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	secara kolaboratif daring; menyelesaikan jurnal refleksi individual secara mandiri dan mengunggahnya ke LMS sebelum atau segera setelah sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa menuntaskan siklus proyek semester dengan mengemas seluruh hasil kerja (peta aktor, analisis relasi kekuasaan, kajian pilkada, analisis data terbuka, dan policy brief) menjadi presentasi kohesif yang menunjukkan progres berpikir sejak minggu pertama Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(1997); Putnam (1993); Komisi Pemberantasan Korupsi (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kerja akademik orang lain sebagai wujud nilai harmoni dan integritas Tugas: Jurnal refleksi individual 500-700 kata memuat: (1) tiga pembelajaran substantif paling bermakna sepanjang semester, (2) evaluasi jujur atas kontribusi diri dalam tim, dan (3) satu komitmen konkret terkait integritas dalam peran sebagai analis atau praktisi kebijakan di masa depan	Setiap kelompok menyiapkan dan menyampaikan presentasi final yang mengintegrasikan seluruh hasil kajian semester: dari analisis aktor dan relasi kekuasaan hingga rekomendasi policy brief; setiap anggota kelompok wajib mengambil bagian dalam penyampaian materi; secara individual, setiap mahasiswa menyusun jurnal refleksi yang mendokumentasikan perjalanan berpikir, evaluasi kontribusi diri, dan artikulasi komitmen integritas sebagai calon praktisi kebijakan Deliverable: Dua deliverable terpisah: (1) file presentasi final kelompok (PowerPoint atau setara, 12-18 slide) yang mencerminkan integrasi seluruh kajian semester, dikumpulkan melalui LMS sebelum sesi; (2) jurnal refleksi			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				individual 500-700 kata (format dokumen pengolah kata atau PDF), dikumpulkan melalui LMS paling lambat 24 jam setelah sesi presentasi			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester : Cakupan: Sub-CPMK5–Sub-CPMK8						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	20	
2	Laporan Aktor-Arena	15	
3	UTS	25	
4	Policy Brief	15	
5	UAS	25	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Laporan Aktor-Arena	UTS	Policy Brief	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	—	5	—	—	5
Sub-CPMK2	10	—	5	—	—	15
Sub-CPMK3	10	—	5	—	—	15
Sub-CPMK4	—	15	5	—	—	20
Sub-CPMK5	—	—	—	8	7	15
Sub-CPMK6	—	—	—	—	6	6
Sub-CPMK7	—	—	—	7	6	13
Sub-CPMK8	—	—	5	—	6	11
Bobot Komponen (%)	20	15	25	15	25	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Menyusun Laporan Kajian Politik Lokal, Policy Brief Advokasi Kebijakan, dan Mempresentasikannya melalui Simulasi Forum Advokasi Publik atas Satu Kasus Empiris di Kawasan Timur Indonesia

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Teori Dan Praktek Politik Lokal				
KODE	3PBIP223	sks	3	SEMESTER	6
DOSEN PENGAMPU	Purwanto, S.IP., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) terintegrasi Case-Based Learning (CBL)					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Menyusun Laporan Kajian Politik Lokal, Policy Brief Advokasi Kebijakan, dan Mempresentasikannya melalui Simulasi Forum Advokasi Publik atas Satu Kasus Empiris di Kawasan Timur Indonesia					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK3: Menganalisis pola relasi kekuasaan dan peta aktor politik lokal — mencakup koalisi, patronase, dan konflik elite — berdasarkan data empiris dari satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi.					
Sub-CPMK4: Menyusun laporan analisis aktor-arena yang terstruktur dan berbasis data atas satu kasus empiris politik lokal di Kawasan Timur Indonesia sebagai kulminasi kajian pra-UTS.					
Sub-CPMK5: Mengidentifikasi isu politik lokal yang urgen dan merumuskan problem statement advokasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data terbuka dan platform SPBE yang tersedia.					

Sub-CPMK6: Merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan lintas disiplin melalui simulasi presentasi advokasi. Sub-CPMK7: Menyusun policy brief yang akuntabel dan beretika atas isu politik lokal yang dikaji, mencerminkan komitmen antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan secara kolaboratif. Sub-CPMK8: Mempresentasikan hasil kajian politik lokal secara kolaboratif dan merefleksikan pembelajaran serta komitmen integritas diri dalam peran tim lintas disiplin melalui presentasi final dan jurnal refleksi.
DISKRIPSI TUGAS Mahasiswa secara berkelompok lintas disiplin (3–4 orang) memilih satu kabupaten/kota di wilayah Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia sebagai unit analisis, kemudian secara progresif: (1) memetakan aktor dan arena kekuasaan politik lokal berbasis data empiris, (2) menganalisis pola relasi kekuasaan menggunakan minimal dua kerangka teori (pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, atau patron-klien), (3) mengidentifikasi isu politik lokal yang urgen dan merumuskan problem statement advokasi berbasis bukti dari data terbuka/platform SPBE, serta (4) menyusun policy brief yang akuntabel dan beretika, dilengkapi strategi advokasi yang dikomunikasikan dalam simulasi forum advokasi publik. Proyek ini mencerminkan nilai integritas antikorupsi, kebangsaan, dan tanggung jawab pelayanan publik sebagaimana dituntut dalam praktik good governance di daerah.
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus) Pemetaan aktor-arena politik lokal (pemerintah daerah, DPRD, partai, elite lokal, masyarakat sipil, aktor bisnis) berbasis data empiris satu kabupaten/kota di Sulawesi/KTI Analisis komparatif menggunakan minimal dua kerangka teori: pluralisme, elitisme, neo-institusionalisme, dan/atau pendekatan patron-klien untuk membaca dinamika pemerintahan daerah Identifikasi isu politik lokal urgen dan perumusan problem statement advokasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data terbuka (portal satu data daerah, SIPD, OMSPAN, atau platform SPBE setempat) Penyusunan policy brief terstruktur (maks. 6 halaman) yang memuat latar belakang isu, analisis bukti, dan rekomendasi kebijakan konkret yang beretika dan mencerminkan nilai antikorupsi Perancangan strategi advokasi komprehensif (peta pemangku kepentingan, pesan kunci, kanal komunikasi, rencana aksi) yang disesuaikan konteks politik lokal KTI Simulasi forum advokasi publik: presentasi policy brief kepada 'pemangku kepentingan' (sesama mahasiswa, dosen, dan/atau tamu undangan praktisi pemerintahan daerah) disertai sesi tanya-jawab dan negosiasi argumen Jurnal refleksi individu yang mendokumentasikan proses belajar, dinamika tim, dan komitmen integritas diri selama proyek berlangsung
LANGKAH Pengerjaan Tugas Langkah 1 (Mg 9–10) — Pemilihan Kasus & Pemetaan Awal: Kelompok menetapkan kabupaten/kota sasaran di Sulawesi/KTI, mendefinisikan ruang lingkup kajian, dan menyusun matriks aktor-arena awal berdasarkan sumber sekunder (dokumen resmi, berita, laporan lembaga). Luaran antara: Lembar Kerja Pemetaan Aktor (1–2 halaman) dikumpulkan untuk umpan balik dosen. Langkah 2 (Mg 10–11) — Pengumpulan Data & Analisis Relasi Kekuasaan: Kelompok mengumpulkan data empiris (wawancara/FGD narasumber lokal min. 3 orang atau triangulasi dokumen primer), kemudian menganalisis pola koalisi, patronase, dan konflik elite menggunakan dua kerangka teori yang dipilih. Luaran antara: Draf Bab I–II Laporan Kajian Politik Lokal. Langkah 3 (Mg 11–12) — Identifikasi Isu & Perumusan Problem Statement: Berdasarkan temuan analisis, kelompok mengidentifikasi satu isu politik lokal yang paling urgen, menelusuri data terbuka dari platform SPBE/portal open data daerah, dan merumuskan problem statement advokasi yang terukur (What-Who-Why-So What). Luaran antara: Problem Statement Advokasi (1 halaman) dikonsultasikan ke dosen. Langkah 4 (Mg 12–13) — Finalisasi Laporan Kajian & Perancangan Strategi Advokasi: Kelompok melengkapi laporan analisis aktor-arena (Bab III–IV), menyusun peta pemangku kepentingan advokasi, menetapkan pesan kunci dan kanal komunikasi, serta merancang rencana aksi advokasi. Luaran antara: Laporan Kajian Politik Lokal lengkap (draft final) + Matriks Strategi Advokasi. Langkah 5 (Mg 13–14) — Penyusunan Policy Brief: Kelompok menyusun policy brief (maks. 6 halaman) mengikuti struktur baku: ringkasan eksekutif, konteks & isu, analisis bukti, pilihan kebijakan, dan rekomendasi. Rekomendasi wajib menyertakan klausul integritas/antikorupsi yang relevan dan merujuk pada regulasi otonomi daerah yang berlaku. Luaran antara: Policy Brief draft dikonsultasikan ke dosen. Langkah 6 (Mg 14) — Penyiapan Materi Presentasi & Gladi Simulasi: Kelompok menyiapkan slide (maks. 15 slide), merancang narasi advokasi, dan melaksanakan gladi bersih simulasi forum advokasi di dalam kelas (peer review)

antar kelompok). Setiap anggota menulis jurnal refleksi individu (300–500 kata) mencakup pembelajaran substantif dan perkembangan komitmen integritas diri.

Langkah 7 (Mg 15) — Simulasi Forum Advokasi Publik (Presentasi Final): Setiap kelompok mempresentasikan kajian dan policy brief-nya dalam format forum advokasi publik (15 menit presentasi + 10 menit tanya-jawab). Seluruh anggota kelompok wajib hadir dan berkontribusi aktif. Jurnal refleksi individu dikumpulkan pada hari yang sama.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Laporan Kajian Politik Lokal (10–15 halaman, tidak termasuk lampiran): memuat pemetaan aktor-arena, analisis relasi kekuasaan berbasis dua kerangka teori, dan temuan empiris. 2) Policy Brief (maks. 6 halaman, format standar): memuat ringkasan eksekutif, analisis bukti berbasis data terbuka/SPBE, pilihan kebijakan, dan rekomendasi beretika. 3) Materi Presentasi (slide maks. 15 halaman + rekaman video forum advokasi). 4) Jurnal Refleksi Individu (300–500 kata per anggota). Semua dokumen dikumpulkan dalam satu folder digital (PDF) melalui LMS paling lambat H+1 setelah presentasi final.

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. **Pemetaan Aktor-Arena & Analisis Relasi Kekuasaan (bobot 25%).** Dinilai dari kelengkapan dan kedalaman identifikasi aktor (min. 5 kategori aktor), ketepatan penerapan dua kerangka teori yang dipilih, serta kualitas analisis pola koalisi, patronase, dan konflik elite yang didukung data empiris dari kasus kabupaten/kota yang dipilih di Sulawesi/KTI.

b. **Policy Brief (Kualitas Isi & Etika Rekomendasi) (bobot 30%).** Dinilai dari ketajaman perumusan problem statement advokasi, kesesuaian struktur policy brief, kekuatan bukti yang bersumber dari data terbuka/platform SPBE, relevansi dan kelayakan rekomendasi kebijakan, serta eksplisitnya klausul integritas/antikorupsi dan nilai-nilai kebangsaan dalam rekomendasi yang dihasilkan.

c. **Strategi Advokasi & Kualitas Presentasi Forum (bobot 25%).** Dinilai dari kelogisan dan kontekstualisasi strategi advokasi (peta pemangku kepentingan, pesan kunci, kanal komunikasi), kemampuan mengkomunikasikan argumen secara efektif kepada audiens lintas disiplin dalam simulasi forum advokasi, dan kualitas penanganan pertanyaan/sanggahan selama sesi tanya-jawab.

d. **Jurnal Refleksi Individu (bobot 10%).** Dinilai dari kedalaman refleksi terhadap proses belajar substantif (penguasaan konsep dan teori), kejujuran dalam mendokumentasikan dinamika tim, serta kejelasan artikulasi komitmen integritas diri dan nilai pelayanan publik yang berkembang selama proyek berlangsung.

e. **Kontribusi Individu dalam Tim & Kepatuhan Administrasi (bobot 10%).** Dinilai dari konsistensi kontribusi aktif setiap anggota yang dibuktikan melalui log kerja kelompok, kehadiran dan peran nyata dalam seluruh tahapan proyek (termasuk gladi dan forum final), serta kepatuhan terhadap format, batas pengumpulan, dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

JADWAL PELAKSANAAN

Mg 9: Pembentukan kelompok lintas disiplin (3–4 orang), pemilihan kabupaten/kota sasaran, dan pengesahan topik oleh dosen
Mg 10: Penyerahan Lembar Kerja Pemetaan Aktor-Arena (luaran antara) + umpan balik dosen; mulai pengumpulan data empiris
Mg 11: Konsultasi kemajuan analisis relasi kekuasaan + penyerahan draf Bab I–II Laporan Kajian
Mg 12: Penyerahan Problem Statement Advokasi (1 halaman) untuk konsultasi + finalisasi data empiris
Mg 13: Penyerahan Laporan Kajian Politik Lokal lengkap (draf final) + Matriks Strategi Advokasi
Mg 14: Konsultasi draf Policy Brief + gladi simulasi forum advokasi (peer review antar kelompok di kelas)

Mg 15: Simulasi Forum Advokasi Publik — Presentasi Final seluruh kelompok; pengumpulan Jurnal Refleksi Individu pada hari yang sama H+1 setelah Mg 15: Batas akhir pengumpulan seluruh dokumen digital (Laporan, Policy Brief, Slide, Rekaman, Jurnal Refleksi) melalui LMS	
LAIN-LAIN	
Final project dikerjakan secara berkelompok (3–4 mahasiswa lintas program studi/disiplin jika memungkinkan sesuai kebijakan fakultas), namun penilaian Jurnal Refleksi Individu dan komponen Kontribusi Individu dilakukan secara perseorangan berdasarkan log kerja yang ditandatangani seluruh anggota; mahasiswa yang tidak dapat membuktikan kontribusi nyata akan mendapat pengurangan nilai komponen individu hingga 50% dari bobot yang ditetapkan. Keterlambatan pengumpulan luaran antara (Mg 10, 11, 12, 13, 14) dikenai pengurangan 5 poin per hari keterlambatan dari komponen terkait, sedangkan keterlambatan dokumen final (H+1 Mg 15) dikenai pengurangan 10 poin per hari dari total nilai akhir proyek. Pemilihan kasus wajib mendapat persetujuan dosen paling lambat akhir Mg 9 untuk menghindari duplikasi antar kelompok; diprioritaskan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan provinsi-provinsi Kawasan Timur Indonesia guna memperkuat relevansi konteks lokal UNISAN dan penguatan literasi pemerintahan daerah KTI. Seluruh proses pengerjaan, pengumpulan data, dan penyusunan rekomendasi wajib menjunjung prinsip integritas akademik: plagiarisme, fabrikasi data, dan konflik kepentingan yang tidak diungkapkan merupakan pelanggaran berat yang diproses sesuai Peraturan Akademik UNISAN yang berlaku.	
DAFTAR RUJUKAN	
Referensi wajib mengacu pada daftar pustaka resmi RPS Teori dan Praktek Politik Lokal yang telah ditetapkan. Penulisan mengikuti format [Penulis Tahun] sesuai ketentuan RPS. Mahasiswa wajib menggunakan minimal 5 (lima) sumber dari daftar pustaka RPS untuk mendukung kerangka analisis dan policy brief yang disusun.	

5.1 Rubrik Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
2	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
3	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
4	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
5	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.2 Rubrik Laporan-Aktor-Arena — Laporan Aktor-Arena

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Laporan Aktor-Arena			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi
3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

5.3 Tugas Ploicy Brief — Policy Brief

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Policy Brief			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Penguasaan materi	Menguasai penuh, menjelaskan lugas & benar	Menguasai, sedikit ragu	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
2	Organisasi & sistematika	Runtut, logis, mudah diikuti	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
3	Media & visual	Menarik, jelas, mendukung isi	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu
4	Komunikasi & bahasa tubuh	Percaya diri, kontak mata, intonasi tepat	Cukup baik	Datar/bergantung catatan	Cemas, membaca terus
5	Tanggapan pertanyaan	Menjawab tepat & meyakinkan	Menjawab memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab

5.4 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			

No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.5 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.